SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 254 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KERTASARI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kertasari untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kertasari untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN KERTASARI

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Kertasari merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kertasari untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kertasari yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Kertasari yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Kertasari bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kertasari dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Kertasari dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Kertasari agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Kertasari;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kertasari;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Kertasari.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN KERTASARI

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Kertasari dalam menyusun Renja Kecamatan Kertasari.

(2) Renstra Kecamatan Kertasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Kertasari paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Kertasari; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Kertasari.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Kertasari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Kertasari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Kertasari; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Kertasari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN KERTASARI

Pasal 5

(1) Kecamatan Kertasari melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Kertasari dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Kertasari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Kertasari terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Kertasari.
(3) Camat Kertasari menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Kertasari.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KERTASARI

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Kertasari dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Kertasari mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Kertasari dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Kertasari, maka Renstra Kecamatan Kertasari dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Kertasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Kertasari terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Kertasari.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 254

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 254 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KERTASARI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KERTASARI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN
KERTASARI TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KERTASARI
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sebagaimana dalam pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kecamatan Kertasari.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung merupakan tindak lanjut adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung setidaknya mengandung visi, misi, tujuan sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan Strategi yang jelas serta tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Karena kemampuan SDM itu sangat terbatas, bila dibandingkan dengan visinya, maka kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan atau alternatif yang ada. Di dalam memilih alternatif inilah kemudian timbul suatu perencanaan strategis agar visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan tahap demi tahap.

Perubahan Renstra Kecamatan Kertasari merupakan landasan dan pedoman bagi langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39);
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah bagi Kecamatan Kertasari dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta instrumen pengukuran kinerja kecamatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 adalah:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terarah, terpadu, terukur, dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
b. Menyediakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahun dalam periode 2025–2029 agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);
c. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Kertasari;

d. Menjadi dasar evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahun memuat beberapa komponen utama seperti yang diuraikan dalam Intruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, yaitu Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi pada jangka waktu yang ditentukan. Sistematika penulisan rencana strategis ini adalah sebagai beikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 – 2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025 – 2029 dan dilengkapi definisi, amanat, regulasi dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025 – 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang gambaran kedudukan Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan, tugas pokok dan fungsi aparatur Kecamatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang Sumber daya yang ada di Kecamatan Kertasari, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Kertasari berdasarkan target Renstra Kecamatan Kertasari periode sebelumnya.

2.1.4. Kelompok Sasaran layanan

Memuat secara umum tentang kelompok Sasaran layanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Kertasari.

2.2.2. Isu Strategis

Memuat telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kecamatan Kertasari Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, Penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Memuat Tujuan Renstra Perangkat Daerah periode dalam lima tahun mendatang

3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Memuat Sasaran Renstra Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Memuat Strategi Perangkat Daerah dalam necapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Memuat Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja yang akan dihasilkan, indikator, target, dan pagu indikatif yang terdapat dalam renstra dalam lima tahun tahun mendatang

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Memuat tentang Uraian Subkegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah selama lima tahun mendatang

4.3 Target Kinerja Penyelnggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKU PD

Memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD lima tahun mendatang melalui IKU PD

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

Memuat tentang target kinerja penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah lima tahun mendatang melalui Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KERTASARI

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kertasari

Kecamatan Kertasari sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewilayahan. Sejak terbentuk resmi pada tahun 1980 melalui PP Nomor 23 Tahun 1980, Kecamatan Kertasari terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Kabupaten Bandung.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kecamatan Kertasari telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan standar administrasi pemerintahan, penguatan koordinasi antar desa, serta penyediaan layanan publik dasar seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan sederhana, dan fasilitasi program kesejahteraan. Pelayanan di Kecamatan Kertasari cenderung menekankan pendekatan kewilayahan dengan pemahaman kondisi sosial-ekonomi dan geografis setempat, sehingga program dan intervensi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga misalnya penanganan ketentraman, pendampingan pembinaan masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan infrastruktur skala kecamatan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kecamatan Kertasari menyadari bahwa pemahaman terhadap gambaran pelayanan yang dilaksanakan menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029. Oleh karena itu, gambaran pelayanan Kecamatan Kertasari menjadi potret kinerja pelayanan saat ini yang berfungsi sebagai dasar penting dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kecamatan Kertasari berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di Kecamatan Kertasari diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung. Melalui upaya ini, Kecamatan Kertasari berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kertasari

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan Kertasari merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. Pada tahun 1956 sampai dengan 1980 Kertasari merupakan kantor perwakilan kecamatan (Kemantren) Pacet Kabupaten Bandung yang kantornya berada di wilayah kampung kertasari desa nengkelan yang sekarang menjadi desa sukapura. Kemudian pada tanggal 9 Juli 1980 terbit PP Nomor 23 Tahun 1980 tentang pembentukan Kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Margaasih, Ngamprah, Kertasari dan Cikancung. Maka dengan PP tersebut perwakilan Kecamatan Pacet di Kertasari Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan menjadi Kecamatan Kertasari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum,pembangunan dan sosial budaya.
b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya.
c. Penyelengaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d. Penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 disebutkan bahwa Camat membawahkan jabatan sebagai berikut:

1. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan

yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten);
f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. Penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan Subbagian Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

   Mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
   b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
   c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
   d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan;
h. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan subbagian dan seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum dan kepegawaian;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

5. Kepala Seksi Pembangunan

   Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
   c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

6. Kepala Seksi Sosial Budaya

   Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

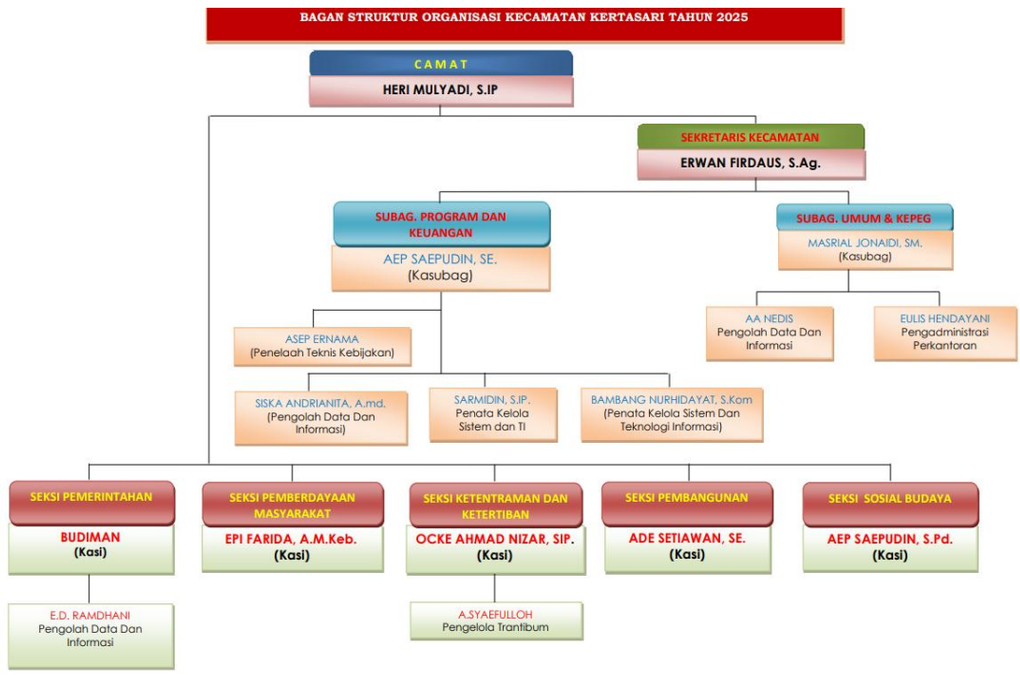
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
   c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

7. Jabatan Fungsional

   Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan kecamatan secara professional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui Struktur Organisasi Kecamatan Kertasari sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung



Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kertasari, 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kertasari

Sumber daya perangkat daerah merupakan aspek kewilayahan yang menggambarkan potensi Perangkat Daerah dimana aspek-aspeknya dapat menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya pada Kecamatan Kertasari.

A. Sumber Daya Aparatur/Pegawai Kecamatan Kertasari

Kecamatan Kertasari dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 24 orang pegawai, terdiri dari 18 orang (ASN), 7 orang (Non-ASN). Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM, baik melalui Pelatihan atau penambahan wawasan melalui pembinaan aparatur terhadap pengetahuan Perundang – undangan maupun terhadap teknis pekerjaannya sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menunjang terhadap capaian target yang telah ditetapkan. Keadaan personil Kecamatan Kertasari per Bulan Januari 2025 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Kecamatan Kertasari berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN	Non ASN	Jumlah
1	Laki – laki	15	3	18
2	Perempuan	3	2	5
Jumlah		18	5	23

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Tabel 2.2
Pegawai Kecamatan Kertasari berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK			
1.	Gol I	-	-	-	-	-	-
2.	Gol II	6	-	1	5	2	7
3.	Gol III	9	1	-	10	1	10
4.	Gol IV	1	-	-	-	-	1
Jumlah		16	1	1	15	3	18

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Kertasari Berdasarkan Jabatan dan Golongan Eselon

No	Jabatan	Jumlah	Pangkat / Gol
1	Camat	1 Orang	Pembina / IVb
2	Sekretaris Kecamatan	1 Orang	Penata Tk.I / IIId
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang	Penata Tk.I / IIId
4	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1 Orang	Penata Tk.I / IIId
5	Kasi Sosial Dan Budaya	1 Orang	Penata Tk.I / IIId
6	Kasi Pemerintahan	1 Orang	Penata Tk.I / IIId
7	Kasi Pembangunan	1 Orang	Penata Tk.I / IIId
8	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	1 Orang	Penata Muda Tk.I/IIIb
9	Kasubag Program dan Keuangan	1 Orang	Penata Muda Tk.I/ IIIb
10	Pelaksana	1 Orang	Penata Muda Tk.I/IIId
10	Pelaksana	1 Orang	Penata Muda Tk.I/IIIb
11	Pelaksana	2 Orang	Penata Muda / IIIa
12	Pelaksana	1 Orang	Pengatur Tk.I /IId
13	Pelaksana	4 Orang	Pengatur / IIc
14	Pelaksana	1 Orang	Pengatur Muda Tk.I/IIb

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Tabel 2.4
Daftar Tenaga Non ASN
Kecamatan Kertasari Tahun 2025

No	Jabatan/Tugas Sehari – hari	Jumlah	Pendidikan	Ket.
1.	1. Tenaga Administrasi 2. Melaksanakan Pelayanan Publik 3. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang	D3	
2.	1. Tenaga Administrasi 2. Melaksanakan Pelayanan Publik 3. Membantu kegiatan lainnya	3 Orang	SMA	
3.	1. Tenaga Administrasi 2. Melaksanakan Pelayanan Publik 3. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang	S1	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Tabel 2.5
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		PNS	CPNS	THL			
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-	-
3	SMA	6	-	3	7	2	9
4	D3	2	0	1	-	3	3
5	S1	9	1	1	11	-	11
6	S2	0	-	-	-	-	0
	Jumlah	17	1	5	18	5	23

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Dari tabel tersebut menunjukkan, Pegawai Kecamatan Kertasari berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD Sebesar 0 % , SMP sebesar 0%, SMA sebesar 39,13%, D3 sebesar 13,04%, berpendidikan S1 sebesar 47,83% dan berpendidikan S2 sebesar 0% Bila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Kertasari didominasi oleh pegawai berpendidikan SLTA dan S1, Kecamatan Kertasari sebagai lembaga teknis daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber daya manusia yang kurang memadai di dalam membangun proses perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas maka pegawai Kecamatan Kertasari berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0% , Golongan II sebanyak 38,88%, Golongan III sebanyak 55,55 % dan Golongan IV sebanyak 5,55 %, melihat komposisi tersebut, pegawai Kecamatan Kertasari dengan SDM tersebut cukup bisa untuk menjalankan roda organisasi yang lebih baik dan lebih maju.

B. Sumber Daya Aset/BMD

Dalam penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik sangat diperlukan akan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun dukungan sarana dan prasarana perangkat daerah terakumulasi dalam penetapan laporan penggunaan Barang Milik Daerah pada satuan perangkat daerah.

Tabel 2.6
Hasil Rekonsiliasi Aset Periode 31 Desember Tahun 2024
Kecamatan Kertasari

NO	URAIAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 31 DESEMBER 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
1	Tanah	452,561,646.00	-	452,561,646.00
2	Peralatan dan Mesin	1,507,598,089.00	1,274,193,113.00	233,404,976.00
3	Gedung dan Bangunan	2,841,390,416.00	645,962,075.00	2,195,428,341.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	98,065,000.00	51,947,958.00	46,117,042.00
5	Aset Tetap Lainnya	1,496,000.00	-	1,496,000.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Total Aset Tetap	4,901,111,151.00	1,972,103,146.00	2,929,008,005.00
7	Aset Tak Berwujud	-	-	-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	270,916,090.00	191,997,217.00	78,918,873.00
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	-	-	-
	Total Aset Lainnya	270,916,090.00	191,997,217.00	78,918,873.00
Total Aset Tetap + Aset Lainnya		5,172,027,241.00	2,164,100,363.00	3,007,926,878.00

Sumber: Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kecamatan Kertasari, 2025

Untuk 5 tahun kedepan dengan rencana strategis yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada pengadaan aset dan pemeliharaan diarahkan pada modernisasi alat kerja/penunjang Kerja (*Hardware*, *Software*) dan Pengadaan/pemeliharaan gedung dengan memperhatikan estetika, dan harus refresentatif dengan segala penunjang atau pendukungnya sesuai ketentuan pada layanan publik.

C. Potensi Kecamatan Kertasari

Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, memiliki potensi yang signifikan dalam berbagai aspek pengembangan. Secara geografis, Kecamatan Kertasari berada di wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 1.250 hingga 1.812 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai kawasan yang subur dan ideal untuk pertanian sayur mayur serta perkebunan. Sumber daya alam (SDA) yang melimpah, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan, memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Selain itu, potensi pariwisata Kertasari sangat menjanjikan dengan adanya objek wisata alam seperti Situ Cisanti dan berbagai lokasi yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata, yang akan menarik kunjungan wisatawan. Infrastruktur di Kecamatan Kertasari, meskipun masih memerlukan penguatan, terus ditingkatkan untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan

pertanian. Dari sisi sosial dan budaya, Kertasari memiliki komunitas yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal, yang dapat difasilitasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, Kecamatan Kertasari berpeluang untuk tumbuh menjadi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kertasari

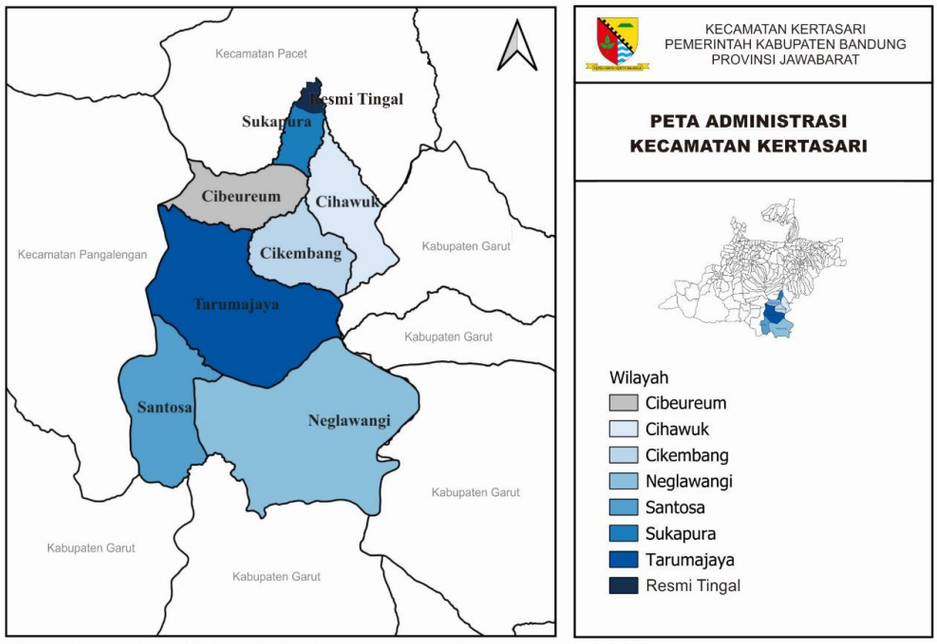
Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kertasari dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Kertasari tahun 2021-2026.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan saran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Kertasari dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi Kecamatan.

2.1.3.1. Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Kertasari

Kecamatan Kertasari berdiri pada tanggal 9 Juli 1980 merupakan hasil pemekaran dari kecamatan pacet yang terletak di sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Bandung. Kecamatan Kertasari sebagai salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, secara topograpis merupakan daerah pegunungan dengan nuansa alam yang sangat indah, Kecamatan Kertasari memiliki ketinggian 1.250 hingga 1.812M diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1.996 mm/tahun dengan suhu udara minimal 11°C s/d 20 °C.

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kecamatan Kertasari



Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Secara administratif Kecamatan Kertasari berbatasan dengan:

- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Pacet Kab. Bandung
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Garut
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Garut
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Pangalengan Kab. Garut

Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Kertasari berada di wilayah Desa Cibeureum yang memiliki jarak ±59 Km dari pusat Ibu Kota Kabupaten Bandung dan ± 69 Km dari Pusat Ibukota Provinsi Jawa Barat.

Kecamatan Kertasari terdiri dari 8 (delapam) desa, diantaranya:

1. Cibeureum
2. Cihawuk
3. Cikembang
4. Neglawangi
5. Santosa
6. Sukapura
7. Tarumajaya
8. Resmi Tingal

Data demografi Kecamatan Kertasari mencerminkan jumlah penduduk, sebaran jenis kelamin, serta komposisi pendidikan yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi

ini tidak hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi juga menjadi acuan dalam memproyeksikan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat lima tahun ke depan.

Secara keseluruhan, luas wilayah di kecamatan ini tersebar dengan satuan pengukuran seragam dalam hektar, mencerminkan keragaman geografis dan administratif di Kecamatan Kertasari.

Tabel 2.7 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kertasari

NO	DESA	Luas Wilayah	Satuan Wilayah	Alamat
1	Sukapura	596,70	Hektar	Jala Raya Sukapura
2	Cibeureum	2.552,07	Hektar	Jalan Lapangsari
3	Tarumajaya	2.743,30	Hektar	Jalan Raya Pajaten-Situ Cisanti
4	Santosa	2.235,68	Hektar	Jalan Raya Santosa
5	Neglawangi	4.447,40	Hektar	Jalan Kawah Papandayan No.2
6	Cihawuk	931,35	Hektar	Jalan Pasir Mulya
7	Cikembang	1.372,53	Hektar	Jalan Raya Cikembang
8	Resmi Tingal	328,33	Hektar	Jalan Raya Pacet

Sumber data berasal dari Seksi Pemerintahan Per 31 Desember Tahun 2024

Data luas wilayah desa di Kecamatan Kertasari menunjukkan variasi yang signifikan antar desa. Desa Neglawangi tercatat sebagai desa dengan luas wilayah terbesar, yaitu 4.447,40 hektar, sementara Desa Resmi Tingal memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 328,33 hektar. Informasi ini menjadi dasar penting untuk memahami struktur spasial dan potensi pengembangan wilayah di tingkat desa.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Jumlah Penduduk di Kecamatan Kertasari

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Kepadatan Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
1	Desa Sukapura	3	20	60	9.690	3.333	5.56	4.977	4.713
2	Desa Cibeureum	5	29	118	19.114	6.306	10.97	9.841	9.273
3	Desa Cihawuk	4	13	43	6.994	2.329	4.01	3.605	3.389
4	Desa Tarumajaya	7	28	109	16.412	5.592	9.42	8.267	8.145
5	Desa Cikembang	4	16	46	7.683	2.528	4.41	3.873	3.810
6	Desa Santosa	4	10	40	4.929	1.827	2.83	2.501	2.428
7	Desa Neglawangi	4	10	41	5.000	1.843	2.87	2.553	2.447
8	Desa Resmi Tingal	3	17	48	6.314	2.181	3.62	3.237	3.077
JUMLAH		34	142	499	76.136	25.939	5.46	38.854	37.282

Sumber : GIS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 2025

Kecamatan Kertasari memiliki jumlah penduduk sebanyak 76.136 jiwa yang tersebar di 8 desa, dengan total 34 dusun, 142 RW, dan 499 RT. Kepadatan penduduk rata-rata di kecamatan ini adalah 5,46 jiwa per hektar. Jumlah penduduk laki-laki adalah 38.854 jiwa, sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan yang

sebanyak 37.282 jiwa. Desa Cibeureum memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 19.114 jiwa, sementara Desa Santosa memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 4.929 jiwa. Terdapat 25.939 kepala keluarga di seluruh kecamatan. Data ini menggambarkan distribusi penduduk yang beragam antar desa di Kecamatan Kertasari, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Pendidikan di Kecamatan Kertasari

DESA	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D1 dan D2	D3	S1	S2	S3
CIBEUREUM	2,889	2,087	7,714	3,647	2,393	16	33	327	8	0
NEGLAWANGI	828	522	2,157	1,074	366	1	10	42	0	0
TARUMAJAYA	2,405	1,815	6,476	3,850	1,665	18	20	161	2	0
RESMITINGAL	1,089	589	2,904	1,111	556	2	9	54	0	0
CIKEMBANG	1,188	842	2,769	1,685	992	2	21	183	1	0
SANTOSA	731	497	1,807	1,395	433	10	3	48	5	0
CIHAWUK	1,239	795	3,347	1,062	479	0	9	61	1	1
SUKAPURA	1,420	1,030	3,897	1,909	1,200	16	40	173	5	0
TOTAL	11,789	8,177	31,071	15,733	8,084	65	145	1,049	22	1

Sumber : GIS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 2025

Secara keseluruhan, rekapitulasi data pendidikan di desa-desa Kecamatan Kertasari memperlihatkan adanya disparitas signifikan dalam tingkat pendidikan penduduk. Sebagian besar penduduk masih berada pada jenjang pendidikan dasar, dengan jumlah yang cukup besar tidak bersekolah atau belum menamatkan SD. Sementara itu, jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang SLTP dan SLTA juga bervariasi antar desa. Partisipasi dalam pendidikan tinggi, khususnya hingga jenjang S2 dan S3, masih sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam akses dan kelanjutan pendidikan di wilayah Kecamatan Kertasari. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan agar lebih banyak warga desa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dapat mendukung kemajuan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kertasari memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi prioritas dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan bagian krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Kecamatan Kertasari, sebagai salah

satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan Masyarakat.

Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Rincian Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut bersifat delegasi yang terdiri atas kewenangan seragam untuk seluruh Camat dan kewenagan tidak seragam untuk Camat tertentu. Kewenangan seragam untuk seluruh Camat terdiri dari 16 (enam belas) urusan dan 28 (dua puluh delapan) kewenangan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.10
Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.
		2. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
		3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
2.	KESEHATAN	4. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
4.	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS)
5.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan
		8. *Monitoring* dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7.	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasarana yang digunakan serta evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. Pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12.	PENANAMAN MODAL	19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. *Monitoring* kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	PARIWISATA	25. Pengembangan Kompetensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
16.	PERTANIAN	28. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

Dengan rincian yang jelas mengenai kewenangan yang dilimpahkan, Kecamatan Kertasari diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Kertasari bertanggung jawab untuk memfasilitasi, memonitor, dan membina berbagai aspek yang berkaitan dengan urusan tersebut, guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Kertasari secara optimal dan terpadu.

2.1.3.2. Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kertasari dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Kertasari tahun 2021-2026. Pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung melaksanakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator sasaran strategis. Berikut adalah tabel target, realisasi dan capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kertasari selama periode tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung

No	Indikator Sasaran Strategis	Target Renstra Kecamatan Kertasari					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	2023	2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	(thn n-2)	(thn n-1)	
1	Indeks kepuasan masyarakat	85	86	83	85	86	81,21	84,15	84,33	83,44	85,54	
2	Persentase BMD dalam kondisi baik	97	98	98	98,03	98,04	96 %	76,90 %	91,37 %	92,62	94,76	
3	Nilai Akip Kecamatan Kertasari	58	60	71	72	73	67,95	68,64	73,30	73,80	46,86	
4	Persentase Desa yang Beradministrasi baik	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	
5	Jumlah Desa Cepat Berkembang	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	2Desa	0Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	2 Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana

sebelumnya Persentase desa beradministrasi baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang.

Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Tahun 2021-2026. Terutama pada indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertasari yaitu nilai IKM yang setiap tahunnya konsisten mengalami peningkatan. Adapun IKU Jumlah Desa Cepat Berkembang belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru dilaksanakan pada tahun 2024. Berikut tingkat capaian kinerja program penunjang dan kewilayahan sebagaimana yang terdapat pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Tahun 2021-2026.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertasari

   Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

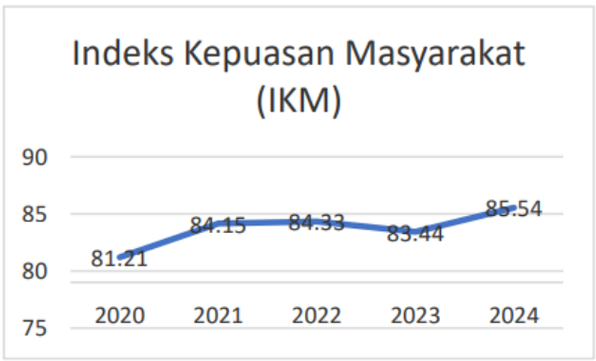
   Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertasari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

      Dalam melaksanakan Program Kegiatan terutama pelayanan langsung terhadap Masyarakat perlu adanya penilaian yang objektif terutama penilaian langsung dari masyarakat dalam hal ini setiap tahunnya Kecamatan Kertasari melaksanakan SPM 3 kali dalam setahun dengan

Indek Kepuasan Masyarakat sebagai Orientasinya dan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) hasil rata – rata pencapaian melampai target, hal tersebut memberikan gambaran bahwa dengan sumber daya yang ada Kecamatan Kertasari dapat memberikan layanan meskipun masih terdapatnya kekurangan dan kelemahannya untuk perbaikan pada 5 tahun mendatang melalui perencanaan strategis dengan visi dan Misi Kabupaten Tahun 2021 – 2026.

Gambar 2.3 Grafik IKM Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Publik Kecamatan Kertasari



Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kecamatan Kertasari telah melaksanakan kewenangan yang yang menjadi faktor pendorong untuk melaksanakan kebijakan, baik pusat mapun Daerah, karena dengan adanya kewenangan baik atributif maupun delegatif Camat beserta jajarannya dapat melaksanakan kegiatan rutin dan kewilayahan dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Bandung melalui alokasi pada DPA Kecamatan Kertasari.

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Indikator ini telah dilaksanakan meskipun belum optimal dan maksimal namun dari Sisi Kewenangan ini khususnya terhadap Pembinaan Lembaga Desa, telah terjadi peningkatan pada Desa yaitu perubahan Desa menjadi Desa Mandiri (2 Desa) dan disisi lain dengan kewenangannya Camat Kertasari telah melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi sehingga Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 berjalan dengan tertib, aman dan terkendali, dan bentuk kewenangan lain yang dilaksanakan adalah melalui tufoksi yang melekat

diantaranya memfasilitasi terhadap perbaikan sarana umum yang rusak, bidang pendidikan dan kesehatan dengan melakukan pembinaan.

b. Jumlah Desa Cepat Berkembang

Gambar 2.4 Grafik Jumlah Desa Cepat Berkembang Kecamatan Kertasari



Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Berdasarkan grafik jumlah desa cepat berkembang di Kecamatan Kertasari, terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2023 tidak ada desa yang masuk kategori cepat berkembang, dengan persentase tetap di angka 0%. Hal ini karena indikator jumlah desa cepat berkembang baru ditetapkan menjadi IKU pada Perubahan Renstra Tahun 2024. Sehingga, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, di mana seluruh desa di Kecamatan Kertasari berhasil masuk dalam kategori desa cepat berkembang dengan persentase mencapai 100%. Perubahan ini diharapkan dapat mendukung kemajuan yang pesat dalam pembangunan dan pengembangan desa di Kecamatan Kertasari, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih efektif.

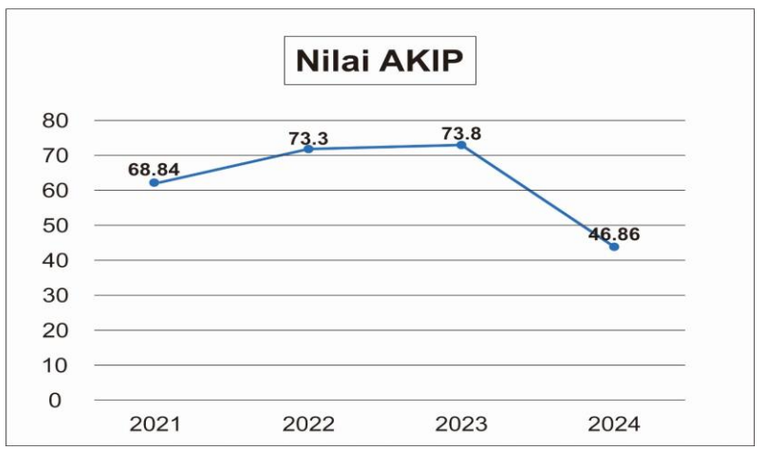
2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kertasari

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, telah melaksanakan evaluasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk periode tahun 2021-2024. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan yang dicapai, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil.

Evaluasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Kecamatan Kertasari untuk periode 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut adalah Capaian IKK pada tahun 2021 – 2024 pada Kecamatan Kertasari:

Gambar 2.5 Grafik Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kertasari



Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Pada tahun 2021, nilai AKIP tercatat sebesar 68,84 dengan target 70, mencerminkan kinerja yang hampir mencapai target, tetapi masih perlu perbaikan. Memasuki tahun 2022, terdapat lonjakan positif dengan realisasi mencapai 73,80 dan capaian 103,24%, menunjukkan efektivitas langkah-langkah strategis yang diambil. Tahun 2023 mempertahankan kinerja tersebut dengan realisasi yang sama, mencapai 73,80 dan capaian 100%, menunjukkan stabilitas dalam pengelolaan kinerja. Namun, tahun 2024 mengalami penurunan signifikan, dengan realisasi hanya 46,86 dari target 73,00, sehingga capaian menjadi 64,19%. Penurunan ini menandakan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, serta penyesuaian strategi untuk memastikan peningkatan akuntabilitas dan responsivitas di masa mendatang. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini mencerminkan perjalanan yang

kompleks dan tantangan yang harus dihadapi Kecamatan Kertasari.

2.1.3.3. Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Kertasari Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bandung periode 2021–2026, Kecamatan Kertasari telah melaksanakan serangkaian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026. Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung menyajikan hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab kecamatan selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Evaluasi ini mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Kertasari, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tingkat capaian kinerja kegiatan rutin maupun kegiatan strategis Kecamatan Kertasari dengan berdasarkan pada sasaran/target Renstra Tahun 2021 - 2026 disajikan pada Tabel 2.12 dan Tabel 2.13 berikut ini :

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP	58 Point	70 Point	71 Point	72 Point	73 Point	67,95 Point	68,64 Point	73,30 Point	73,80 Point	46,86 Point	117.16%	98.06%	103.24%	102.50%	64.19%
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Dokumen	12 Bulan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100.00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1 dokumen	12 Bulan	252 Bulan	252 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	238 Bulan	238 Bulan	100%	100%	100%	94.44%	100.00%
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 Laporan	4 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	4 Laporan	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	0 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	21 Stel	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%
	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	21 Orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Stel	100%	21 Stel	21 Paket	21 Paket	21 Stel	21 Stel	21 Stel	21 Paket	17 Paket	80.95%	80.95%	80.95%	0.00%	100.00%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	12 jenis	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	17 Orang	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%
	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	46 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 jenis	0 jenis	12 jenis	1 Paket	3 Paket	12 jenis	12 jenis	12 jenis	1 Paket	3 Paket	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 jenis	0 Paket	46 jenis	20 Paket	20 Paket	46 jenis	46 jenis	46 jenis	20 Paket	20 Paket	88.46%	88.46%	88.46%	95.00%	100.00%
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 jenis	2 jenis	0 jenis	2 Paket	2 Paket	0 jenis	0 jenis	0 jenis	2 Paket	2 Paket	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	12 Bulan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Galon	0 Galon	0 Galon	0 Paket	0 Paket	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	12 Bulan	2 jenis	2 Paket	2 Paket	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 Paket	2 Paket	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	2 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	3 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	3 Laporan	100%	100%	100%	100%	100.00%
2	Persentase BMD dalam Kondisi baik	97%	98%	98,02 %	98,03 %	98,04 %	96,00 %	76,90 %	91,37 %	92,62 %	94,76 %	93.22%		93.22%	94.48%	96.65%
	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 set	2 set	2 set	1 Paket	3 Paket	2 set	2 set	2 set	1 Paket	3 Paket	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100%	100.00%
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 Unit	1 Unit	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 Unit	1 Unit	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100.00%
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100.00%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100.00%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100.00%
	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100.00%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 unit	16 unit	0 Kendaraan	0 Kendaraan	16 unit	16 unit	16 unit	0 Kendaraan	0 Kendaraan	100%	100%	100%	0.00%	100.00%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	0 unit	0 unit	16 Kendaraan	16 Kendaraan	0 unit	0 unit	0 unit	16 Kendaraan	16 Kendaraan	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	0.00%	100.00%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86	84	85	86	81,21	84,15	84,33	83,44	85,54	95.54%	97.85%	100.39%	98.16%	99.47%
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	85	86	84	85	86	81,21	84,15	84,33	83,44	85,54	95.54%	97.85%	0.00%	0.00%	100.00%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%
	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Laporan	4 Laporan	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%
	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Laporan	2 Laporan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	250 Orang	250 Orang	0 Orang	0 Orang	250 Kegiatan	250 Kegiatan	250 Kegiatan	0 Orang	0 Orang	100%	100%	100%	0.00%	100.00%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	40 Orang	250 Orang	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	40 Orang	250 Orang	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	220 Orang	220 Orang	220 Orang	0 Orang	0 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Orang	0 Orang	100%	100%	100%	0.00%	100.00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	0 Orang	0 Orang	220 Orang	220 Orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	220 Orang	220 Orang	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	Laporan	0 Laporan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%
	Persentase Desa Beradministrasi Baik	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0.00%
4	Jumlah Desa Cepat Berkembang	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	2 Desa	0 Desa		0 Desa	0 Desa	2 Desa	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Laporan	0 Laporan	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase keluarga yg terfasilitasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	100%	0.00%	100.00%
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Jumlah laporan pembinaan PKK	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Laporan	0 Laporan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Peserta	0 Peserta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Indikator yang tertuang dalam tabel di atas merupakan indikator sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Dalam 5 tahun waktu Renstra, pencapaian indikator tahun 2022 tercapai 100%. Hal ini disebabkan karena keselarasan antara perencanaan dan realisasi kinerja. Di tahun ke 2 Renstra yaitu tahun 2023, realisasi tercapai 100%. Salah satu pendorong kinerja adalah koordinasi yang baik antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain faktor pendorong juga terdapat faktor penghambat yang umum yaitu adanya perubahan dalam perencanaan dan penganggaran.

Pencapaian anggaran sebagai pendukung kinerja pelayanan Kecamatan Kertasari tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanan Pelayanan Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik	4,045,948,000	4,405,758,313	4,193,845,900	3,952,914,350	3,952,914,350	4,078,966,562	4,022,799,128	4,430,992,561	0	0	100.82%	91.31%	105.65 %	0.00%	0.00 %	-0.42%	-59.56%
Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2,200,000	40,120,000	40,000,000	3,200,000	3,200,000	33,927,034	32,889,900	29,970,000	0	0	1542.14 %	81.98%	74.93%	0.00%	0.00 %	407.83%	-339.81 %
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,200,000	5,000,000	2,000,000	1,200,000	1,200,000	1,199,900	1,999,900	1,390,000	0	0	99.99%	40.00%	69.50%	0.00%	0.00 %	54.17%	-41.90%
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	2,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000	26,120,000	38,000,000	1,000,000	1,000,000	32,727,134	30,890,000	28,580,000	0	0	3272.71 %	118.26 %	75.21%	0.00%	0.00 %	615.03%	-693.24 %
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	5,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	500,000	500,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	0	500,000	500,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	3,639,448,000	3,863,738,313	3,561,163,800	3,572,164,350	3,572,164,350	3,437,851,696	3,499,606,411	3,712,522,929	0	0	94.46%	90.58%	104.25 %	0.00%	0.00 %	-0.34%	-57.86%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,637,948,000	3,858,238,313	3,557,113,800	3,570,664,350	3,570,664,350	3,436,411,796	3,498,141,611	3,709,108,129	0	0	94.46%	90.67%	104.27 %	0.00%	0.00 %	-0.34%	-57.88%
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	1,439,900	1,464,800	899,200	0	0	95.99%	97.65%	59.95%	0.00%	0.00 %	-16.67%	-50.72%
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	2,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	2,000,000	1,550,000	500,000	500,000	0	0	1,549,600	0	0	0.00%	0.00%	99.97%	0.00%	0.00 %	0.00%	-19.99%
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	966,000	0	0	0.00%	0.00%	96.60%	0.00%	0.00 %	0.00%	-19.32%
Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	0	9,000,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	1,700,000	2,250,000	0	0	0.00%	18.89%	45.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	-12.78%

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	9,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	1,700,000	2,250,000	0	0	0.00%	18.89%	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-12.78%
Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	15,750,000	30,750,000	45,000,000	18,550,000	18,550,000	12,750,000	14,838,000	54,406,520	0	0	80.95%	48.25%	120.90%	0.00%	0.00%	20.70%	-50.02%
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15,750,000	15,750,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	12,750,000	0	24,100,000	0	0	80.95%	0.00%	160.67%	0.00%	0.00%	-9.52%	-48.32%
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	15,000,000	30,000,000	8,550,000	8,550,000	0	14,838,000	30,306,520	0	0	0.00%	98.92%	101.02%	0.00%	0.00%	0.00%	-39.99%
Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	80,550,000	159,449,500	165,000,000	80,550,000	80,550,000	169,862,384	192,909,714	142,589,600	0	0	210.88%	120.98%	86.42%	0.00%	0.00%	12.56%	-83.66%
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5,000,000	5,000,000	7,000,000	3,000,000	3,000,000	4,792,060	3,969,100	6,994,400	0	0	95.84%	79.38%	99.92%	0.00%	0.00%	-4.29%	-55.03%
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10,000,000	53,114,500	63,000,000	10,000,000	10,000,000	101,722,924	69,749,214	62,849,950	0	0	1017.23%	131.32%	99.76%	0.00%	0.00%	91.41%	-249.66%
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1,500,000	5,000,000	2,000,000	2,000,000	0	4,770,400	4,985,250	0	0	0.00%	318.03%	99.71%	0.00%	0.00%	0.00%	-83.55%
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5,000,000	6,400,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	4,854,900	4,000,000	2,470,000	0	0	97.10%	62.50%	24.70%	0.00%	0.00%	8.56%	-36.86%
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,550,000	43,435,000	30,000,000	15,550,000	15,550,000	15,470,000	35,750,000	21,125,000	0	0	99.49%	82.31%	70.42%	0.00%	0.00%	25.06%	-50.44%
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45,000,000	50,000,000	50,000,000	45,000,000	45,000,000	43,022,500	74,671,000	44,165,000	0	0	95.61%	149.34%	88.33%	0.00%	0.00%	0.28%	-66.66%
BMD dalam Kondisi baik						0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47,000,000	33,230,500	29,730,100	10,000,000	10,000,000	0	18,564,500	14,400,000	0	0	0.00%	55.87%	48.44%	0.00%	0.00%	-26.55%	-20.86%
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7,000,000	5,830,500	29,730,100	5,000,000	5,000,000	0	18,564,500	14,400,000	0	0	0.00%	318.40%	48.44%	0.00%	0.00%	77.50%	-73.37%
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40,000,000	27,400,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206,000,000	213,750,000	252,952,000	219,450,000	219,450,000	202,385,548	222,428,103	281,926,596	0	0	98.25%	104.06%	111.45%	0.00%	0.00%	2.21%	-62.75%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18,000,000	42,000,000	36,914,000	37,200,000	37,200,000	10,554,988	28,901,103	31,860,646	0	0	58.64%	68.81%	86.31%	0.00%	0.00%	30.50%	-42.75%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	188,000,000	171,750,000	216,038,000	180,250,000	180,250,000	191,830,560	193,527,000	250,065,950	0	0	102.04%	112.68%	115.75%	0.00%	0.00%	0.14%	-66.09%
Persentase BMD dalam Kondisi Baik						222,189,900	39,862,500	192,926,916	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	55,000,000	55,720,000	95,000,000	45,000,000	45,000,000	27,724,100	0	0	0	0	50.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.79%	-10.08%
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	30,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	20,000,000	0	34,145,000	38,414,500	0	0	0.00%	113.82%	128.05%	0.00%	0.00%	-8.33%	-48.37%

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dan Perizinannya																	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5,000,000	5,720,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,973,800	5,717,500	4,967,500	0	0	99.48%	99.96%	99.35%	0.00%	0.00 %	0.45%	-59.76%
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20,000,000	20,000,000	60,000,000	20,000,000	20,000,000	189,492,000	0	149,544,916	0	0	947.46%	0.00%	249.24 %	0.00%	0.00 %	33.33%	-239.34 %
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
	4,045,948,000	4,405,758,313	4,193,845,900	3,952,914,350	3,952,914,350											-0.42%	0.00%
Indeks Kepuasan Masyarakat	15,000,000	66,000,000	205,000,000	160,000,000	160,000,000	109,100,800	97,552,900	300,572,090	0	0	727.34%	147.81 %	146.62 %	0.00%	0.00 %	132.16%	-204.35 %
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	15,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	9,220,000	8,685,000	9,750,000	0	0	0.00%	57.90%	48.75%	0.00%	0.00 %	0.00%	-21.33%
Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	15,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	9,220,000	8,685,000	9,750,000	0	0	0.00%	57.90%	48.75%	0.00%	0.00 %	0.00%	-21.33%
Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	15,000,000	51,000,000	185,000,000	150,000,000	150,000,000	99,880,800	88,867,900	290,822,090	0	0	665.87%	174.25 %	157.20 %	0.00%	0.00 %	120.96%	-199.46 %
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15,000,000	51,000,000	185,000,000	150,000,000	150,000,000	99,880,800	88,867,900	290,822,090	0	0	665.87%	174.25 %	157.20 %	0.00%	0.00 %	120.96%	-199.46 %
Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	10,000,000	30,100,000	55,000,000	50,000,000	50,000,000	9,744,000	16,005,000	21,675,000	0	0	97.44%	53.17%	39.41%	0.00%	0.00 %	68.66%	-38.00%
Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	15,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	6,220,000	10,050,000	0	0	0.00%	41.47%	40.20%	0.00%	0.00 %	0.00%	-16.33%
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	15,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	6,220,000	10,050,000	0	0	0.00%	41.47%	40.20%	0.00%	0.00 %	0.00%	-16.33%
Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,000,000	15,100,000	30,000,000	25,000,000	25,000,000	9,744,000	9,785,000	11,625,000	0	0	97.44%	64.80%	38.75%	0.00%	0.00 %	33.25%	-40.20%
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,000,000	15,100,000	30,000,000	25,000,000	25,000,000	9,744,000	9,785,000	11,625,000	0	0	97.44%	64.80%	38.75%	0.00%	0.00 %	33.25%	-40.20%

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)																0.00%	0.00%
Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	35,000,000	64,000,000	111,000,000	55,000,000	55,000,000	49,368,300	76,669,300	80,360,900	0	0	141.05%	119.80 %	72.40%	0.00%	0.00 %	26.46%	-66.65%
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35,000,000	64,000,000	111,000,000	55,000,000	55,000,000	49,368,300	76,669,300	80,360,900	0	0	141.05%	119.80 %	72.40%	0.00%	0.00 %	26.46%	-66.65%
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20,000,000	0	0	0	0	18,781,300	0	0	0	0	93.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	-18.78%
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	20,000,000	45,000,000	20,000,000	20,000,000	0	36,672,100	33,626,300	0	0	0.00%	183.36 %	74.73%	0.00%	0.00 %	0.00%	-51.62%
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15,000,000	0	0	0	0	14,983,500	0	-	0	0	99.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	-19.98%
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	15,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,603,500	13,548,800	19,179,600	0	0	0.00%	90.33%	63.93%	0.00%	0.00 %	0.00%	-30.85%
Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	29,000,000	36,000,000	20,000,000	20,000,000	0	26,448,400	27,555,000	0	0	0.00%	91.20%	76.54%	0.00%	0.00 %	0.00%	-33.55%
Persentase Desa Beradministrasi Baik								-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Desa Cepat Berkembang								-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	75,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	42,035,000	52,893,600	127,592,400	0	0	0.00%	70.52%	106.33 %	0.00%	0.00 %	0.00%	-35.37%
Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	0	25,000,000	40,000,000	5,000,000	5,000,000	42,035,000	11,696,000	73,284,400	0	0	0.00%	46.78%	183.21 %	0.00%	0.00 %	0.00%	-46.00%
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	25,000,000	40,000,000	5,000,000	5,000,000	0	11,696,000	73,284,400	0	0	0.00%	46.78%	183.21 %	0.00%	0.00 %	0.00%	-46.00%
Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	-	50,000,000	80,000,000	15,000,000	15,000,000	42,035,000	41,197,600	54,308,000	0	0	0.00%	82.40%	67.89%	0.00%	0.00 %	0.00%	-30.06%
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	35,000,000	50,000,000	5,000,000	5,000,000	32,435,000	33,789,600	34,808,000	0	0	0.00%	96.54%	69.62%	0.00%	0.00 %	0.00%	-33.23%
Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	15,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	9,600,000	7,408,000	9,750,000	0	0	0.00%	49.39%	65.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	-22.88%
Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi	0	0	15,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	9,750,000	0	0	0.00%	0.00%	65.00%	0.00%	0.00	0.00%	-13.00%

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tepat Guna															%		
Persentase keluarga yg terfasilitasi	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Persentase desa yang dibina dan diawasi	120,000,000	97,630,000	85,000,000	75,000,000	75,000,000	55,959,000	59,715,100	99,191,600	0	0	46.63%	61.16%	116.70 %	0.00%	0.00 %	-10.84%	-44.90%
Persentase desa yang dibina	120,000,000	97,630,000	85,000,000	75,000,000	75,000,000	55,959,000	59,715,100	99,191,600	0	0	46.63%	61.16%	116.70 %	0.00%	0.00 %	-10.84%	-44.90%
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20,000,000	20,000,000	0	0	0	9,784,000	0	-	0	0	48.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	-9.78%
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	9,600,000	9,880,000	47,562,400	0	0	96.00%	98.80%	237.81 %	0.00%	0.00 %	37.50%	-86.52%
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	9,425,000	9,648,500	16,302,000	0	0	94.25%	48.24%	81.51%	0.00%	0.00 %	37.50%	-44.80%
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	12,630,000	0	20,000,000	0	0	7,272,800	-	0	0	0.00%	57.58%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	-11.52%
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	35,000,000	35,000,000	45,000,000	35,000,000	35,000,000	27,150,000	32,913,800	35,327,200	0	0	77.57%	94.04%	78.50%	0.00%	0.00 %	1.59%	-50.02%
Jumlah laporan pembinaan PKK	35,000,000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah	10,000,000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Pada Tabel 2.13 menggambarkan tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kertasari dimana secara gambaran umum memperlihatkan perjalanan penyelenggaraan anggaran sesuai dengan target yang akan di capai oleh Kecamatan Kertasari.

2.1.3. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Kertasari

Kelompok sasaran Kecamatan adalah target utama yang akan dilayani atau dilibatkan dalam Pembangunan dan kegiatan di Tingkat Kecamatan, agar program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertasari, maka yang menjadi kelompok sasaran layanan Kecamatan Kertasari antara lain sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa;
b. Masyarakat;
c. Organisasi Perangkat Daerah.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Kertasari juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

2.1.4. Mitra Kecamatan Kertasari dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Kecamatan dalam pemberian pelayanan adalah pihak-pihak (lembaga, organisasi, atau perorangan) yang bekerja sama dengan kecamatan untuk merencanakan, melaksanakan, mendukung, dan mengawasi penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Mitra ini membantu memastikan layanan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertasari, maka yang menjadi Mitra Kecamatan Kertasari dalam pemberian layanan antara lain sebagai berikut :

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Disdukcapil berperan sebagai mitra dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan kerjasama antara kecamatan dan Disdukcapil, pelayanan

kependudukan dapat lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat di tingkat kecamatan.

b. Puskesmas/RS/tenaga kesehatan: penyedia layanan kesehatan primer dan rujukan.
c. Kepolisian (Polsek) dan Koramil: menjaga keamanan, ketertiban, serta dukungan dalam penanganan darurat.
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): penanganan dan mitigasi bencana serta tanggap darurat.
e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil: pelaksanaan program pemberdayaan, advokasi, dan pendampingan masyarakat.
f. Kader Posyandu dan mitra sosial: Camat memberikan nomor kontak person kepada kader posyandu dan mitra sosial untuk mempercepat koordinasi penanganan masalah sosial.
g. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mitra Mandiri: Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan. Program ini melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah Kabupaten, Komandan Kodim, DP2P3AKB, Dinas Pendidikan, Polres, Kejaksaan Negeri, serta unsur kecamatan dan desa setempat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Kertasari dapat terus memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra pelayanan, baik dari sektor pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan sinergi yang baik antara kecamatan dan mitra pelayanan, diharapkan dapat tercipta pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kerja sama antara kecamatan dan mitra pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat Kecamatan Kertasari.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kertasari

2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah isu prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Isu-isu ini disusun untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan visi

Indonesia Emas 2045. Berbagai sektor strategis, seperti sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi, menjadi fokus utama dalam perencanaan ini. Setiap isu prioritas dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fundamental yang masih menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti *mismatch* keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Isu Strategis Wilayah Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029:

Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitamya. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah. Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur frsik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.

Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa. Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan dengan kebutuhan industri. Prevalensi stunting, wasting, dan underweigh masih relative tinggi Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa masih cenderung tinggi.

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala

yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

- Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
- Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kecamatan Kertasari, sebagai bagian integral dari Kabupaten Bandung, turut merasakan dampak dari isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025-2029. Beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian di tingkat kecamatan ini meliputi belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien, serta rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Secara spesifik, permasalahan ini termanifestasi dalam bentuk:

- Kertasari memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, namun pemanfaatannya belum dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah produk industri lokal. Hilirisasi yang terbatas menyebabkan ketergantungan pada penjualan bahan mentah, yang berakibat pada rendahnya pendapatan dan terbatasnya lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat setempat.
- Sebagai bagian dari Kabupaten Bandung, Kertasari diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, pengembangan pusat pertumbuhan di kecamatan kertasari belum efisien, ditandai dengan kurangnya infrastruktur pendukung, regulasi yang menghambat investasi, serta koordinasi yang kurang optimal antar pemangku kepentingan.
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, baik fisik maupun digital, menghambat akses

masyarakat kertasari terhadap informasi, pasar, dan layanan publik. Selain itu, akses terhadap pendidikan juga masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Dengan mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Kertasari dapat merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi kabupaten bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan misi 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” yaitu:

1. Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.14 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic government*
2	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan
3	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian karena masih diperlukan peningkatan dalam menghadapi perubahan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah penting untuk mengatasi tantangan ini adalah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem digital. Dengan meningkatkan stabilitas dan koordinasi dalam sistem digital pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 memiliki implikasi khusus bagi pengembangan Kecamatan Kertasari, terutama dalam kaitannya dengan isu-isu strategis yang menjadi fokus RPJPD. Kecamatan Kertasari, dengan karakteristik wilayahnya yang didominasi oleh kawasan pertanian dan perkebunan, memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kertasari melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan ekowisata. Pengembangan kewilayahan berkelanjutan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kertasari memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis sebagai kawasan resapan air. Selain itu, infrastruktur dasar yang inklusif perlu diperhatikan

untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan pertanian. Dengan demikian, RPJMD 2025-2029 menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kertasari, dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif.

2.2.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan Kecamatan Kertasari sehingga dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan proritas wilayah pelayanan Kecamatan Kertasari dalam jangka panjang.

Kecamatan Kertasari sebagai salah satu Wilayah yang termasuk dalam lingkup wilayah Kabupaten bandung dalam menentukan Rencana Stategis sangat memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah tersebut diatas.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wiyah yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Kertasari adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Kecamatan Kertasari Termasuk dalam Kawasan Bandung Selatan (KBS)

2. Kertasari termasuk dalam Pusat pelayanan lingkungan (PPL) adalah kawasan perdesaan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
3. Wilayah Kecamatan berfungsi sebagai perkebunan, permukiman, pertanian, wisata, agroindustri, kehutanan dan konservasi.

Membaca Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2016 – 2036, sektor wilayah Kecamatan Kertasari secara geografis merupakan Kecamatan yang berada di dataran tinggi/pegunungan dan daerah perbatasan wilayah dengan Kabupaten Garut serta berpotensi menjadi daerah wisata, dengan dimulainya objek wisata 0 km Citarum (Situ Cisanti Desa Tarumajaya), dan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Kertasari berpotensi menjadi desa wisata seperti Situ Cihaniwung di desa Santosa, Tegal Panjang di Desa Neglawangi, Kampung Kina di desa Cikembang, Kampung Konyal di desa Cihawuk, AW Strawberry di desa sukapura, kampung pisang di desa Cibeureum, dan Situs Batu Nanceb di desa Resmitingal. Selain wisata, potensi tata ruang Kecamatan Kertasari juga dapat dilihat dalam bidang Industri Rumah Tangga yang berkembang dalam makanan khas berupa kerupuk kentang, karamel dan olahan dari wortel. Mata pencaharian penduduk kecamatan kertasari masih dominan bergerak di sektor pertanian sayur mayur bila terkelola dengan baik dan profesional, dapat menyumbang ketersediaan sayuran di wilayah kabupaten Bandung.

2.2.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Selanjutnya, dalam kontek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Kertasari bahwa Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009). Penetapan 3

(tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Kertasari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maksud dari penyusunan KLHS RPJMD ini yaitu untuk melakukan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan KLHS ini bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-2029, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah/ Kecamatan.

Dalam hal ini seluruh kegiatan perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan bertujuan sebagai upaya pengendalian lingkungan yang ada di Kecamatan Kertasari dapat dilakukan dengan optimal, sehingga dampak negatif dari setiap Misi yang tertera di dalam Dokumen Renstra dapat dikendalikan serta dilaksanakan.

2.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kertasari

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada

ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dalam melaksanakan fugas pokok dan fungsi kecamatan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian pelayanan kepada masyarakat. Tugas, pokok dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari pelayanan kecamatan yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu pelayanan kepada masyarakat baik berkaitan dengan pelayanan, tugas umum pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, yaitu:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya capaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati;
4. Akuntabilitas kinerja kecamatan belum memadai;
5. Belum optimalnya pemeliharaan barang milik daerah;
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi;
7. Belum optimalnya pemahaman terhadap tupoksi;
8. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang berorientasi kepada peningkatan kinerja;
9. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa;
10. Belum optimalnya Kepatuhan terhadap peraturan;
11. Belum optimalnya Pengelolaan Kualitas lingkungan dan pengelolaan SDA;
12. Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam;
13. Belum optimalnya pengananan sampah rumah tangga yang menumpuk di area permukiman warga, mempercepat erosi dan risiko longsor.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada di kecamatan, akan menimbulkan dampak kepada masyarakat, dan harus dilakukan tindakan yang nyata.

Tabel 2.15
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur	Kualitas kinerja aparatur rendah (kompetensi, jumlah tidak memadai)	Rekrutmen dan formasi ASN belum sesuai kebutuhan, anggaran pembinaan dan pelatihan terbatas, beban kerja tinggi, kurangnya program peningkatan kompetensi.
2	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.	Ketidakjelasan tugas dan fungsi serta prosedur layanan	SOP/standar pelayanan belum lengkap atau tidak tersosialisasi, koordinasi antar unit lemah, dan sistem informasi pelayanan kurang memadai.
3	Belum optimalnya capaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati.	Masih Belum jelasnya peraturan tentang pelimpahan kewenangan	Pelimpahan kewenangan kepada camat tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis.
4	Akuntabilitas kinerja kecamatan belum memadai	Akuntabilitas dan mekanisme monitoring-evaluasi kinerja kecamatan belum memadai	Kapasitas kepegawaian untuk perencanaan & pelaporan rendah, data dan sistem pelaporan belum terintegrasi, dan kultur transparansi belum kuat.
		Masih saling mengandalkan dalam melaksanakan pekerjaan	
5	Belum optimalnya pemeliharaan barang milik daerah.	Belum optimalnya inventarisasi barang milik daerah	Pemeliharaan Barang belum optimal
6	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.	Masih Kurangnya SDM yang menguasai IT	Tersedianya TI yang Tidak dimanfaatkan dengan baik
7	Belum optimalnya pemahaman terhadap tupoksi.	Masih Kurangnya pemahaman aparatur kecamatan terhadap tugas pokok dan fungsinya	Keterbatasannya SDM Aparatur dalam pelaksanaan Tugas Fungsi
8	Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang berorientasi kepada peningkatan kinerja	Masih kurangnya budaya yang berorientasi pada kinerja	Kurangnya pemahaman akan perjanjian kinerja dan program kerja masing-masing
9	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Masih kurangnya pemahaman terhadap tata Kelola pemerintahan desa	Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya dalam melaksanakan tugas pokoknya.
		Kapasitas tata kelola pemerintahan desa (perencanaan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program) lemah	Pembinaan dan pendampingan desa terbatas, SDM aparatur desa kurang terlatih, dokumen perencanaan (data dasar/APBDes) belum lengkap, partisipasi masyarakat rendah.
11	Belum optimalnya Kepatuhan terhadap peraturan	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan rendah	Sosialisasi peraturan minim, penegakan hukum dan sanksi lemah, akses layanan hukum terbatas, serta norma/kebiasaan lokal belum selaras dengan regulasi.
12	Belum optimalnya Pengelolaan Kualitas lingkungan dan pengelolaan SDA	Degradasi lingkungan dan pemeliharaan lingkungan kurang	Praktik pengelolaan sumberdaya tidak berkelanjutan (penebangan, konversi lahan), program reboisasi/konservasi terbatas, pengawasan dan penegakan lingkungan lemah, dan kesadaran masyarakat rendah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
13	Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam	Produktivitas/ nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata alam masih rendah	Akses modal dan teknologi terbatas, kelembagaan ekonomi lokal/lembaga petani lemah, infrastruktur akses dan pemasaran kurang, dan promosi wisata belum optimal.
14	Belum optimalnya pengananan sampah rumah tangga yang menumpuk di area permukiman warga, mempercepat erosi dan risiko longsor	Masih Kurangnya TPS di daerah perbukitan dan minimnya kesadaran warga terhadap dampak lingkungan	Penyediaan TPS terpadu di zona rawan longsor, pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan sampah, dan program reboisasi

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

2.2.6. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap perangkat daerah dimasa yang datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan di Kecamatan Kertasari, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
3. Meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan daerah.
4. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan umum.
5. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa
6. Meningkatkan kualitas masyarakat dalam berlingkungan guna menopang pelaksanaan pembangunan daerah.

Isu-isu strategis yang perlu penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan

ruang, yang akan mempengaruhi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efesien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang epektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Menerapkan pola kualitas lingkungan dengan pembinaan dan sosialisasi tentang kebijakan penerapan RTRW di Kabupaten bandung terhadap Kecamatan khususnya Kecamatan Kertasari.

Tabel 2.16

Isu Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelayanan publik tingkat dasar dan Potensi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, wisata alam)	Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur	Kualitas kinerja aparatur	Reformasi birokrasi pelayanan	Peningkatan akuntabilitas publik	Koordinasi antar daerah	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan pelayanan
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Ketidakjelasan tugas dan fungsi	Tuntutan transparansi	Kebijakan pelayanan publik	Program peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Tata kelola pemerintahan desa	Penguatan kapasitas pemerintahan desa	Program peningkatan tata kelola desa	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa
	Meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan	Kepatuhan hukum masyarakat	Penegakan hukum yang lebih ketat	Sosialisasi perundang-undangan	Kampanye kepatuhan hukum	Meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan
	Meningkatkan kualitas masyarakat dalam berlingkungan	Pemeliharaan lingkungan	Program reboisasi dan konservasi	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan untuk pembangunan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Isu Strategis 1 : Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan pelayanan
Isu strategis ini berfokus pada peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia (aparatur) dan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur, serta peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik.

Isu Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan
Isu strategis ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan responsivitas pelayanan publik.

Isu Strategis 3 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa
Isu strategis ini berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Isu Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan
Isu strategis ini berfokus pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup sosialisasi peraturan perundang-undangan, penegakan hukum yang lebih efektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kertasari merupakan arah yang hendak dicapai dalam periode perencanaan lima tahunan, yang disusun secara selaras dengan visi dan misi Bupati Bandung sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025– 2029. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kertasari didasarkan pada analisis kondisi wilayah, potensi yang dimiliki, permasalahan aktual yang dihadapi, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Kertasari yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

3.1.1. Tujuan

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, penetapan tujuan perangkat daerah menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perumusan sasaran dan program pembangunan yang terukur. Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban.

Saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode tahun 2025-2029 memilki visi yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih

Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
2. Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
3. Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

- Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak

- Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
- Misi 3 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi
- Misi 5 : Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir logis (*Logical Framework*) pencapaian misi dalam bentuk *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa kecamatan akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masuk ke dalam misi ke 3, yaitu: "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel".

Tata kelola pemerintahan adalah salah satu aspek mendasar dalam manajerial Sebuah pemerintahan yang baik yang harus memegang prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, melibatkan stakeholder dunia usaha, konsensus, akuntabilitas, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas.

Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada tingkat Kecamatan tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan kewenangan camat/Kecamatan dikarenakan hal tersebut merupakan tugas yang melekat pada camat yang diatur dengan perundangan – undangan dan selain itu kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan merupakan kewenangan yang bersipat mandataris yang wajib dilaksanakan meskipun dalam kewenangan tersebut tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dikarenakan potensi yang tidak ada maupun tuntutan kebutuhannya yang tidak pasti kuantitasnya dalam ukuran tahunan.

Kecamatan Kertasari sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan administrasi yang cepat, mudah, dan akuntabel. Selama periode perencanaan lima tahunan 2025–2029, Kecamatan Kertasari menetapkan tujuan strategis yaitu: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik". Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat wilayah yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan dasar bagi masyarakat. Pelayanan publik yang dimaksud tidak hanya menyangkut layanan administrasi kependudukan, tetapi juga mencakup fasilitasi program pembangunan, pengaduan masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta pembinaan kepada pemerintah desa.

Tujuan ini juga sejalan dengan misi ketiga Kabupaten Bandung, yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel". Dengan mengacu pada misi tersebut, Kecamatan Kertasari diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, serta membangun sistem kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan tersebut tidak hanya menjadi target internal Kecamatan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.1.2. Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Perangkat Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Pembangunan Kecamatan Kertasari Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Sebagai implementasi dari tujuan strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik", Kecamatan Kertasari menetapkan sasaran

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan” sebagai fokus pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Sasaran ini menjadi landasan utama dalam mendorong transformasi layanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung termuat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Kertasari pada periode tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju IKM	0.40	0.45	0.51	0.58	0.66	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	85.89	86.28	86.72	87.22	87.80	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

3.2. Strategi Kecamatan Kertasari dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh PD yang bersangkutan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam rangka memberikan Kontribusi terhadap Visi dan Misi Kabupaten bandung Tahun 2021 – 2026, Tim Perumus Renstra Kecamatan Kertasari telah merumuskan Motto Kecamatan Kertasari yaitu Spirit Bedas “Kertasari Bisa” dengan filosofi semangat Bedas (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) pelayanan kecamatan kertasari memiliki motto “Kertasari Bisa” yang merupakan komitmen pegawai Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. "Bangkit" merefleksikan semangat juang dan kemandirian pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan. "Inspiratif" menggambarkan sikap pegawai yang mampu memotivasi masyarakat dan menjadi contoh dalam bersikap. "Sejahtera" menunjukkan upaya pegawai untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terwujud melalui pelayanan yang efektif dan efisien. Sementara "Agamis" mencerminkan nilai-nilai spiritual yang melandasi seluruh tindakan pegawai dalam melayani masyarakat. Dengan berpedoman pada motto ini, diharapkan pegawai Kecamatan Kertasari dapat memberikan pelayanan yang prima, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kertasari, strategi yang perlu ditempuh adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Dan Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Menigkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Meningkatkan Kualitas Pemerintahanan Desa.

Renstra Kecamatan Kertasari untuk periode 2025-2029 dirancang dengan mempertimbangkan tujuan strategis yang jelas dan terukur. Setiap tahap dalam rencana ini berfokus pada berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada kolaborasi dan penggunaan teknologi. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Kertasari

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Berikut adalah penjelasan mengenai penahapan tersebut:

TAHAP I : (2026)

Pada tahun pertama, fokus utama adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan. Ini dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pembenahan sarana dan prasarana publik. Diharapkan, ini dapat meningkatkan efektivitas

pelayanan publik dan memberikan dasar yang kokoh untuk langkah selanjutnya.

TAHAP II : (2027)

Memasuki tahun kedua, kegiatan akan beralih ke peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan memperhatikan umpan balik dari masyarakat, kecamatan akan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan yang ada. Selain itu, akan dilaksanakan program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

TAHAP III : (2028)

Di tahun ketiga, fokus akan beralih ke pengembangan dan optimalisasi pelayanan berbasis digital. Kegiatan ini akan mencakup penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Melalui platform digital, diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kecepatan dalam berinteraksi dengan aparatur kecamatan.

TAHAP IV : (2029)

Pada tahun keempat, Kecamatan Kertasari akan mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta. Ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan inovasi dalam pelayanan. Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan program-program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

TAHAP V : (2030)

Tahap terakhir pada tahun 2030 akan berfokus pada evaluasi dari seluruh program yang telah dilaksanakan selama lima tahun. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan berkelanjutan. Dengan demikian, Kecamatan Kertasari dapat terus beradaptasi terhadap perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

Dengan penahapan yang terstruktur dan bertahap ini, diharapkan Kecamatan Kertasari mampu mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengacu pada motto SPIRIT BEDAS “KERTASARI BISA”, diharapkan seluruh pegawai Kecamatan Kertasari dapat memberikan pelayanan yang prima dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Kertasari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah Langkah yang diambil oleh perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Arah kebijakan Kecamatan Kertasari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 berorientasi pada peningkatan Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien. Setiap kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi program sebelumnya, dan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah.

Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, mendorong inovasi pelayanan dengan berbasis teknologi, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lokal. Selain itu, setiap tahapan kebijakan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Seluruh kebijakan diharapkan mampu menciptakan pelayanan prima serta pembangunan daerah yang berkelanjutan, adaptif, dan inklusif.

Berikut ini disajikan tabel Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra Kecamatan Kertasari

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

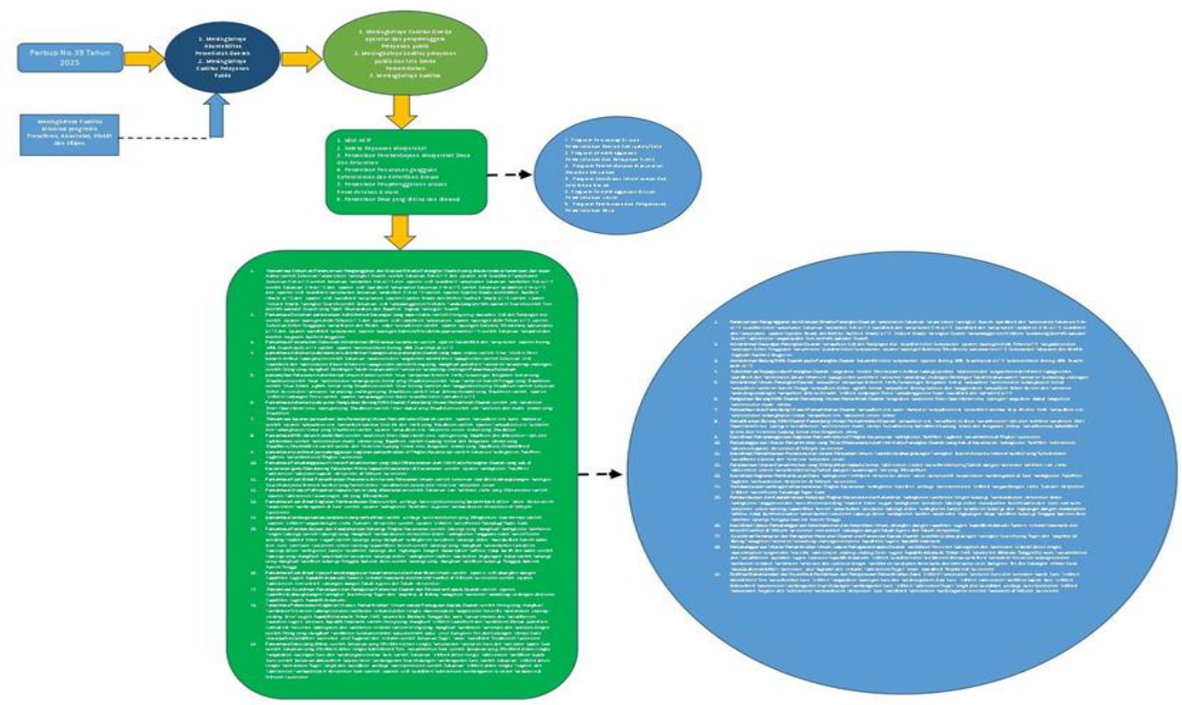
Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Rencana strategis Kecamatan Kertasari tahun 2025-2029 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Untuk merumuskan program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra PD dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sesuai dengan visi dan misi, strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka Kecamatan Kertasari mempunyai 6 (enam) Program, program–program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelanggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dalam merumuskan program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra PD

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju IKM		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Aplikasi Surabi oleh Bagian Organisasi dan Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko oleh Inspektorat
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Inspektorat
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							ketentuan /Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan/jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana/ Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina : Dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyrakatan Desa dan Kelurahan x 100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana/ Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi/ Jumlah fasilitasi Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan/ Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan : Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana/ Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/ Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa : Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi/Total jumlah desa x100%
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN				5,541,280,308.00	-	5,267,970,800.00	-	5,355,986,000.00	-	5,400,525,950.00	-	5,570,087,030.00	
KECAMATAN				5,541,280,308.00	-	5,267,970,800.00	-	5,355,986,000.00	-	5,400,525,950.00	-	5,570,087,030.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0 point	61 Point	4,911,263,300.00	63,5 Point	4,835,062,000.00	66 Point	4,835,062,000.00	68,5 Point	4,835,062,000.00	71 Point	4,835,062,000.00	
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	42,57 point	42.70 Point		42.80 Point		42.90 Point		43 Point		43.10 Point		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	46,86 point	62 Point	39,200,000.00	63 Point	39,200,000.00	64 Point	39,200,000.00	65 Point	39,200,000.00	66 Point	39,200,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2,200,000.00	2 Dokumen	2,200,000.00	2 Dokumen	2,200,000.00	2 Dokumen	2,200,000.00	3 Dokumen	2,200,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0	2 Dokumen	6,120,000.00	2 Dokumen	6,120,000.00	2 Dokumen	6,120,000.00	2 Dokumen	6,120,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0	2 Dokumen	6,120,000.00	2 Dokumen	6,120,000.00	2 Dokumen	6,120,000.00	2 Dokumen	6,120,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	4,080,000.00	1 dokumen	4,080,000.00	1 dokumen	4,080,000.00	1 dokumen	4,080,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	4,080,000.00	1 dokumen	4,080,000.00	1 dokumen	4,080,000.00	1 dokumen	4,080,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	31,000,000.00	1 Laporan	10,600,000.00	1 Laporan	10,600,000.00	1 Laporan	10,600,000.00	1 Laporan	10,600,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 dokumen	2 dokumen	3,000,000.00	2 dokumen	3,000,000.00	2 dokumen	3,000,000.00	2 dokumen	3,000,000.00	2 dokumen	3,000,000.00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 dokumen	2 data	3,000,000.00	20 data	3,000,000.00	20 data	3,000,000.00	20 data	3,000,000.00	20 data	3,000,000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	4,313,282,000.00	100%	4,313,282,000.00	100%	4,313,282,000.00	100%	4,313,282,000.00	100%	4,313,282,000.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Pegawai	252 Orang/Bulan	4,309,082,000.00	252 Orang/Bulan	4,309,082,000.00	252 Orang/Bulan	4,309,082,000.00	252 Orang/Bulan	4,309,082,000.00	252 Orang/Bulan	4,309,082,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000.00	2 Laporan	1,500,000.00	2 Laporan	1,500,000.00	2 Laporan	1,500,000.00	2 Laporan	1,500,000.00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1,700,000.00	4 Laporan	1,700,000.00	4 Laporan	1,700,000.00	4 Laporan	1,700,000.00	4 Laporan	1,700,000.00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000.00	1 dokumen	1,000,000.00	1 dokumen	1,000,000.00	1 dokumen	1,000,000.00	1 dokumen	1,000,000.00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100%	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,000,000.00	1 Laporan	4,000,000.00	1 Laporan	4,000,000.00	1 Laporan	4,000,000.00	1 Laporan	4,000,000.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100%	100%	15,912,000.00	100%	37,550,000.00	100%	37,550,000.00	100%	37,550,000.00	100%	37,550,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	0 Paket	-	21 Paket	19,000,000.00	21 Paket	19,000,000.00	21 Paket	19,000,000.00	21 Paket	19,000,000.00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	21 Orang	15,912,000.00	21 Orang	18,550,000.00	21 Orang	18,550,000.00	21 Orang	18,550,000.00	21 Orang	18,550,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	168,060,000.00	100%	94,060,000.00	100%	94,060,000.00	100%	94,060,000.00	100%	94,060,000.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5,000,000.00	3 Paket	5,000,000.00	3 Paket	5,000,000.00	3 Paket	5,000,000.00	3 Paket	5,000,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	97,510,000.00	20 Paket	21,510,000.00	20 Paket	21,510,000.00	20 Paket	21,510,000.00	20 Paket	21,510,000.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4,000,000.00	2 Paket	2,000,000.00	2 Paket	2,000,000.00	2 Paket	2,000,000.00	2 Paket	2,000,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3,000,000.00	2 Paket	5,000,000.00	2 Paket	5,000,000.00	2 Paket	5,000,000.00	2 Paket	5,000,000.00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	13,550,000.00	2 Laporan	15,550,000.00	2 Laporan	15,550,000.00	2 Laporan	15,550,000.00	2 Laporan	15,550,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	45,000,000.00	3 Laporan	45,000,000.00	3 Laporan	45,000,000.00	3 Laporan	45,000,000.00	3 Laporan	45,000,000.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	26,839,300.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	26,839,300.00	3 Paket	10,000,000.00	3 Paket	10,000,000.00	3 Paket	10,000,000.00	3 Paket	10,000,000.00	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	10,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	247,040,000.00	100%	230,040,000.00	100%	230,040,000.00	100%	230,040,000.00	100%	230,040,000.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17,200,000.00	12 Laporan	17,200,000.00	12 Laporan	17,200,000.00	12 Laporan	17,200,000.00	12 Laporan	17,200,000.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	227,840,000.00	12 Laporan	209,840,000.00	12 Laporan	209,840,000.00	12 Laporan	209,840,000.00	12 Laporan	209,840,000.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	94,76	98,06	96,930,000.00	98,07	96,930,000.00	98,08	96,930,000.00	98,09	96,930,000.00	98,10	96,930,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	66,930,000.00	16 Unit	66,930,000.00	16 Unit	66,930,000.00	16 Unit	66,930,000.00	16 Unit	66,930,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	10,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Jumlah 1				4,911,263,300.00		4,835,062,000.00		4,835,062,000.00		4,835,062,000.00		4,835,062,000.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	0%	100%	250,017,008.00	100%	222,908,800.00	100%	320,924,000.00	100%	355,463,950.00	100%	535,025,030.00	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	0%	0%	0	0%	10,000,000.00	0%	10,000,000.00	0%	10,000,000.00	0%	10,000,000.00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100%	100%	240,017,008.00	100%	202,908,800.00	100%	300,924,000.00	100%	335,463,950.00	100%	515,025,030.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	240,017,008.00	4 Laporan	202,908,800.00	4 Laporan	300,924,000.00	4 Laporan	335,463,950.00	4 Laporan	515,025,030.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100%		180,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00	S.3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100%	30,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	30,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	100%	100%	65,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000.00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	85,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	20 Keluarga	10,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	20 Keluarga	10,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	10,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	20 Keluarga	10,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	20 Keluarga	15,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	20 Keluarga	10,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	20 Keluarga	10,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	20 Keluarga	10,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	20 Keluarga	5,000,000.00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	35,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	15,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	20,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%		90,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	90,000,000.00	100%	45,000,000.00	100%	45,000,000.00	100%	45,000,000.00	100%	45,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	250 Orang	45,000,000.00	250 Orang	15,000,000.00	250 Orang	15,000,000.00	250 Orang	15,000,000.00	250 Orang	15,000,000.00	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	220 Orang	220 Orang	15,000,000.00	220 Orang	10,000,000.00	220 Orang	10,000,000.00	220 Orang	10,000,000.00	220 Orang	10,000,000.00	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	30,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	100%	100%	75,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	55,000,000.00	S.3.1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	100%	100%	75,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	55,000,000.00	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen	10,000,000.00	0 Dokumen	-	2 Dokumen	10,000,000.00	0 Dokumen	-	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000.00	2 Dokumen	35,000,000.00	2 Dokumen	35,000,000.00	2 Dokumen	35,000,000.00	2 Dokumen	35,000,000.00	
				630,017,008.00		432,908,800.00		520,924,000.00		565,463,950.00		735,025,030.00	
			-	5,541,280,308.00	-	5,267,970,800.00	-	5,355,986,000.00	-	5,400,525,950.00	-	5,570,087,030.00	

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Ket :

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH : Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien

4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program yang telah dirancang ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan kegiatan yang lebih terarah. Kecamatan Kertasari yang memiliki peran dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung melalui misi ke 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” telah memetakan subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

Tanpa ada dukungan dari Kegiatan dan Sub Kegiatan program prioritas Pembangunan daerah tidak dapat berjalan dengan baik berikut ini daftar Sub Kegiatan prioritas yang mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kertasari tahun 2025-2029 dirumuskan secara sistematis melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja.

Berdasarkan indikator kinerja Kecamatan yang dijabarkan dari RPJMD kedalam Rencana Strategis Kecamatan Kertasari, diidentifikasi indikator kinerja yang bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang

tinggi bagi peningkatan performa kinerja Kecamatan Kertasari. Indikator Kinerja tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kertasari yaitu Laju IKM.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kertasari

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Laju IKM	Persen	0.01	0.40	0.45	0.51	0.58	0.66	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengyukuran kinerja menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Namun pada Tingkat Kecamatan, masih terdapat tantangan signifikan, salah satunya adalah belum tersedianya Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terstruktur dan terstandarisasi. Ketiadaan IKK ini menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi kinerja secara obyektif, serta membatasi kemampuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan Kecamatan berdampak langsung terhadap Masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang Indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju IKM	Persen	0.01	0.40	0.45	0.51	0.58	0.66	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Kertasari, 2025

Laju IKM menjadi IKK bagi Kecamatan Kertasari sebagai poin dalam menilai keberhasilan kinerja di 5 tahun renstra.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra Kecamatan Kertasari disusun sebagai dokumen awal perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada RPJMD serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.

Renstra Kecamatan Kertasari memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya, termasuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Penyusunan Renstra Kecamatan juga mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data, sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya dokumen ini, Kecamatan diharapkan dapat menjadi simpul koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan dan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, Renstra ini akan menjadi bahan pembahasan dalam forum Diskusi maupun konsultasi guna memperoleh masukan untuk menyempurnakan dokumen sebelum ditetapkan sebagai Renstra Kecamatan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025 - 2030 merupakan Pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Kertasari dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dengan adanya Renstra ini diharapkan dalam pelaksanaanya, tujuan organisasi dapat tercapai secara sinergi dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2030. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut di atas , perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kecamatan Kertasari 2025 - 2030 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2030.
2. Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025 - 2030 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari (Renja Kecamatan Kertasari) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Rentra Kecamatan Kertasari harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kertasari (RKA – DPA Kecamatan Kertasari).
4. Apabila ada kebijaksanaan Panganggaran untuk Kecamatan Kertasari di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perubahan / perbaikan.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025 - 2030 yang tercermin dari Renja-PD Kecamatan Kertasari, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Di tingkat kecamatan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah disepakati.

Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi ini mencakup

evaluasi internal oleh kecamatan dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKIP). Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, kecamatan dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya, hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Aparatur Kecamatan Kertasari dalam rangka melaksakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan kebijakan, Program, dan kegiatan dituntut memiliki karakter dan sifat Tangguh Adaftif, Inovatif, dan Kreatif. Menjadi sebuah komitmen bahwa dokumen ini harus menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Kertasari, September 2025

CAMAT KERTASARI

Ttd

HERI MULYADI

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Pegawai Kecamatan Kertasari berdasarkan Jenis kelamin	24
Tabel 2.2	Pegawai Kecamatan Kertasari berdasarkan Golongan	24
Tabel 2.3	Pegawai Kecamatan Kertasari Berdasarkan Jabatan dan Golongan Eselon...	24
Tabel 2.4	Daftar Tenaga Non ASN Kecamatan Kertasari Tahun 2025	24
Tabel 2.5	Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2.6	Hasil Rekonsiliasi Aset Periode Tahun 2024 Kecamatan Kertasari	26
Tabel 2.7	Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kertasari	29
Tabel 2.8	Rekapitulasi Jumlah Penduduk di Kecamatan Kertasari.....	29
Tabel 2.9	Rekapitulasi Pendidikan di Kecamatan Kertasari	30
Tabel 2.10	Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.....	31
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.....	33
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	39
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanan Pelayanan Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	47
Tabel 2.14	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah.....	57
Tabel 2.15	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	62
Tabel 2.16	Isu Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.....	64
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	71
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Kertasari.....	73
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kertasari.....	75
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD.....	78
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	95
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	104
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kertasari.....	106
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kertasari.....	106

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	23
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kecamatan Kertasari	28
Gambar 2.3	Grafik IKM Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Publik Kecamatan Kertasari	35
Gambar 2.4	Grafik Jumlah Desa Cepat Berkembang Kecamatan Kertasari	36
Gambar 2.5	Grafik Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kertasari	37
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD	76